

DOI: <https://doi.org/10.38035/jmpis.v7i6><https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received: 15 September 2026 | Revised: 23 Oktober 2026 | Accepted: 24 Oktober 2026

Kepercayaan Mahasiswa terhadap Akuntabilitas Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam Pengelolaan APBD: Studi pada Mahasiswa Perguruan Tinggi di Samarinda

Nurul Restiani¹, Suhardiman², Diana³

¹Universitas 17 Agustus 1945, Samarinda, Indonesia, nurulrestiani04@gmail.com

²Universitas 17 Agustus 1945, Samarinda, Indonesia, suhardiman0572@gmail.com

³Universitas 17 Agustus 1945, Samarinda, Indonesia, diana.fisip@gmail.com

Corresponding Author: diana.fisip@gmail.com³

Abstract: *This study aims to understand students' perceptions of the accountability of the East Kalimantan Provincial Government in managing the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD), particularly in the context of the official vehicle procurement issue. This study employs a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through semi-structured interviews with 15 students from three universities in Samarinda. The analysis draws on the dimensions of public trust, namely competence, benevolence, and integrity, to understand informants' perceptions of accountability and transparency in APBD management. The analysis identified three patterns of trust perceptions: Critical Trust, Conditional Trust, and Distrust. Critical Trust refers to trust accompanied by a critical attitude, Conditional Trust indicates trust that depends on certain conditions, while Distrust reflects a lack of trust within the context examined. Informants' responses revealed concerns about budget priorities, information openness, government accountability, and the benefits of budget utilization for the public. Informants also viewed transparency, appropriate budget prioritization, openness to criticism, and consistent accountability as important aspects of building trust. These findings represent the perceptions of the 15 informants interviewed and are not intended to represent all students or the wider community.*

Keywords: *Public Trust, Public Accountability, APBD Management, Students, Local Government*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk memahami persepsi mahasiswa terhadap akuntabilitas Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya dalam konteks isu pengadaan kendaraan dinas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur terhadap 15 mahasiswa dari tiga perguruan tinggi di Samarinda. Analisis menggunakan dimensi *public trust*, yaitu *competence*, *benevolence*, dan *integrity*, untuk memahami persepsi informan terhadap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan APBD. Hasil analisis mengidentifikasi tiga pola persepsi kepercayaan, yaitu *Critical Trust*,

Conditional Trust, dan *Distrust*. *Critical Trust* menggambarkan kepercayaan yang disertai sikap kritis, *Conditional Trust* menunjukkan kepercayaan yang bergantung pada kondisi tertentu, sedangkan *Distrust* mencerminkan ketidakpercayaan dalam konteks yang diteliti. Jawaban informan menunjukkan perhatian terhadap prioritas anggaran, keterbukaan informasi, pertanggungjawaban pemerintah, dan manfaat penggunaan anggaran bagi masyarakat. Informan juga memandang transparansi, ketepatan prioritas anggaran, keterbukaan terhadap kritik, dan konsistensi pertanggungjawaban sebagai aspek penting dalam membangun kepercayaan. Temuan ini merepresentasikan persepsi 15 informan yang diwawancarai dan tidak dimaksudkan untuk menggambarkan seluruh mahasiswa atau masyarakat secara umum.

Kata Kunci: Kepercayaan Publik, Akuntabilitas Publik, Pengelolaan APBD, Mahasiswa, Pemerintah Daerah

PENDAHULUAN

Kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah tidak hanya dibentuk oleh kualitas pelayanan dan kinerja pemerintahan, tetapi juga oleh bagaimana pemerintah mengelola serta mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran publik. Persoalan ini menjadi relevan di Kalimantan Timur ketika pengadaan kendaraan dinas Gubernur Kalimantan Timur senilai Rp8,49 miliar yang bersumber dari APBD Perubahan Tahun 2025 menimbulkan kritik dan kegelisahan di ruang publik. Pengadaan tersebut memicu kegaduhan di media sosial serta menjadi perhatian berbagai media lokal maupun nasional karena besarnya nilai anggaran yang digunakan untuk fasilitas jabatan (ANTARA, 2026a; Media Kaltim, 2026; RRI, 2026). Kendaraan tersebut telah melalui proses serah terima pada 20 November 2025, namun Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kemudian memutuskan untuk mengembalikan kendaraan tersebut kepada pihak penyedia setelah mencermati berbagai masukan dari Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pemeriksa Keuangan, serta aspirasi yang disampaikan oleh tokoh masyarakat dan tokoh agama (Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, 2026; ANTARA, 2026b).

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga menegaskan bahwa kendaraan tersebut belum pernah digunakan untuk operasional gubernur dan pengembaliannya dilakukan sebagai bentuk respons terhadap aspirasi masyarakat dengan mengutamakan harmoni serta kepercayaan publik di atas fasilitas jabatan. Selain itu, pemerintah memastikan dana pengadaan kendaraan akan dikembalikan ke kas daerah sesuai mekanisme yang berlaku setelah proses pengembalian kepada penyedia selesai (Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, 2026; Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur, 2026). Fenomena empiris ini memperlihatkan adanya ketegangan antara keputusan pemerintah dalam menggunakan anggaran publik dengan tuntutan masyarakat terhadap prioritas, kepatutan, dan pertanggungjawaban penggunaan sumber daya publik. Kritik yang muncul hingga berujung pada pengembalian kendaraan menunjukkan bahwa suatu keputusan anggaran tidak hanya dinilai berdasarkan aspek administratif dan keuangan, tetapi juga berdasarkan sejauh mana keputusan tersebut dapat dijelaskan, dipertanggungjawabkan, dan dipandang berorientasi pada kepentingan publik. Dengan demikian, kasus tersebut menjadi relevan untuk memahami bagaimana penilaian terhadap akuntabilitas pengelolaan anggaran dapat memengaruhi hubungan kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah daerah.

Kepercayaan publik merupakan modal penting bagi pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dipengaruhi oleh persepsi mengenai keterbukaan informasi, integritas, dan kemampuan pemerintah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran publik. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan faktor yang

saling berkaitan dalam membentuk kepercayaan publik. Nurrizkiana et al. (2017) membuktikan bahwa keterbukaan informasi keuangan daerah mampu meningkatkan kepercayaan public stakeholders. Temuan tersebut diperkuat oleh Hasibuan dan Listiarini (2025) yang menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan masyarakat. Semakin baik penerapan kedua prinsip tersebut, semakin tinggi pula tingkat legitimasi pemerintah di mata masyarakat.

Kepercayaan publik terhadap pemerintah berkaitan erat dengan bagaimana masyarakat menilai akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan anggaran publik. Akuntabilitas memungkinkan masyarakat untuk menilai sejauh mana pemerintah mampu menjelaskan, mempertanggungjawabkan, dan memberikan alasan atas keputusan serta penggunaan sumber daya publik. Dalam konteks tersebut, keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban pemerintah menjadi bagian penting dalam membentuk persepsi masyarakat mengenai integritas dan kompetensi pemerintah. Ketika masyarakat menilai bahwa anggaran dikelola secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, dan berorientasi pada kepentingan publik, kondisi tersebut dapat memperkuat kepercayaan terhadap pemerintah. Sebaliknya, keterbatasan informasi dan munculnya keputusan anggaran yang dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dapat menimbulkan keraguan serta melemahkan kepercayaan publik (Beshi & Kaur, 2020).

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji hubungan antara transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik dalam konteks pengelolaan keuangan pemerintah. Nurrizkiana et al. (2017) membahas pengaruh transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terhadap kepercayaan public stakeholders. Hasibuan dan Listiarini (2025) mengkaji pengaruh transparansi dan akuntabilitas syariah terhadap kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan dana publik pemerintah daerah. Sementara itu, Yulastina et al. (2025) lebih menitikberatkan pada pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap peningkatan kinerja pemerintah daerah. Penelitian Rasidayu et al. (2026) juga menegaskan bahwa transparansi anggaran daerah merupakan strategi penting dalam meningkatkan akuntabilitas publik. Meskipun memiliki fokus yang berbeda, penelitian-penelitian tersebut sama-sama menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan faktor utama dalam membangun kepercayaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam konteks penelitian ini, mahasiswa dipandang sebagai kelompok masyarakat yang memiliki peran strategis dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan melalui fungsi social control. Sebagai kelompok intelektual, mahasiswa memiliki kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, serta memberikan penilaian kritis terhadap kebijakan dan kinerja pemerintah, termasuk dalam pengelolaan anggaran publik. Persepsi mahasiswa terhadap akuntabilitas pemerintah daerah menjadi penting karena dapat menggambarkan tingkat kepercayaan generasi muda terhadap tata kelola pemerintahan. Penelitian Ananditha et al. (2025) menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki kemampuan untuk menilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas lembaga publik secara kritis sehingga persepsi mereka dapat menjadi indikator penting dalam mengevaluasi tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Oleh karena itu, mahasiswa dipilih sebagai subjek penelitian karena memiliki posisi strategis dalam memberikan penilaian kritis terhadap pemerintah daerah dan memaknai bagaimana akuntabilitas pengelolaan anggaran publik serta bagaimana penilaian tersebut berkaitan dengan kepercayaan mereka terhadap pemerintah.

Kepercayaan publik (public trust) merupakan modal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena memengaruhi hubungan antara masyarakat dan pemerintah serta berkaitan dengan legitimasi pemerintah, penerimaan masyarakat terhadap kebijakan, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks organisasi pemerintah, Grimmelikhuijsen dan Knies (2017) menjelaskan kepercayaan warga sebagai suatu sikap yang mencerminkan penilaian positif terhadap organisasi pemerintah berdasarkan persepsi

mengenai keterpercayaan organisasi tersebut. Salah satu model yang digunakan untuk memahami kepercayaan warga terhadap organisasi pemerintah dikembangkan oleh Grimmelikhuijsen dan Knies (2017) melalui tiga dimensi, yaitu kompetensi (*competence*), benevolensi (*benevolence*), dan integritas (*integrity*). Kompetensi berkaitan dengan persepsi mengenai kemampuan dan efektivitas pemerintah dalam menjalankan tugasnya, benevolensi berkaitan dengan sejauh mana pemerintah dinilai memiliki niat baik dan kepedulian terhadap kepentingan masyarakat, sedangkan integritas berkaitan dengan persepsi mengenai kejujuran serta kesesuaian tindakan pemerintah dengan prinsip-prinsip yang dapat diterima masyarakat.

Model Grimmelikhuijsen dan Knies (2017) digunakan dalam penelitian ini karena mampu menjelaskan kepercayaan publik secara multidimensional dan relevan untuk menelaah bagaimana mahasiswa menilai pemerintah daerah dalam konteks akuntabilitas pengelolaan anggaran publik. Dimensi kompetensi digunakan untuk memahami penilaian mahasiswa terhadap kemampuan pemerintah dalam mengambil dan mengelola keputusan anggaran secara tepat; dimensi benevolensi digunakan untuk melihat sejauh mana pemerintah dinilai menunjukkan kepedulian dan mengutamakan kepentingan masyarakat dalam penggunaan sumber daya publik, sedangkan dimensi integritas digunakan untuk memahami penilaian mahasiswa terhadap kejujuran, konsistensi, dan kesesuaian tindakan pemerintah dengan prinsip yang dapat diterima publik. Ketiga dimensi tersebut memungkinkan penelitian ini memahami kepercayaan mahasiswa bukan sekadar sebagai sikap percaya atau tidak percaya, tetapi sebagai proses penilaian terhadap kemampuan, niat baik, dan integritas pemerintah dalam mengelola serta mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran publik.

Meskipun penelitian terdahulu telah membahas kepercayaan publik terhadap pemerintah dan pentingnya tata kelola yang baik, masih diperlukan pemahaman lebih lanjut mengenai bagaimana mahasiswa menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran publik melalui suatu isu konkret. Popova dan Grishin (2023) membahas kepercayaan politik generasi muda dalam kaitannya dengan strategi komunikasi dan sumber informasi politik, sedangkan Beshi dan Kaur (2020) menekankan pentingnya praktik tata kelola pemerintahan dalam menjelaskan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Penelitian ini berfokus pada persepsi mahasiswa terhadap akuntabilitas Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam pengelolaan APBD, khususnya dalam konteks isu pengadaan kendaraan dinas. Dengan demikian, kesenjangan penelitian terletak pada perlunya eksplorasi mengenai bagaimana mahasiswa memaknai akuntabilitas pemerintah daerah melalui penilaian terhadap kompetensi, kepedulian terhadap kepentingan masyarakat, serta integritas pemerintah dalam pengelolaan anggaran publik.

Kebaruan penelitian ini terletak pada eksplorasi pola persepsi kepercayaan mahasiswa melalui dimensi *public trust*, yaitu *competence*, *benevolence*, dan *integrity* (Grimmelikhuijsen & Knies, 2017). Ketiga dimensi tersebut digunakan untuk memahami bagaimana informan menilai kemampuan pemerintah dalam menentukan prioritas anggaran, perhatian terhadap kebutuhan masyarakat, serta integritas dan pertanggungjawaban dalam penggunaan anggaran publik. Penelitian ini juga mengidentifikasi tiga pola persepsi kepercayaan, yaitu *Critical Trust*, *Conditional Trust*, dan *Distrust*, yang dikembangkan melalui pengelompokan analitis terhadap jawaban informan. Dengan demikian, kebaruan penelitian terletak pada pemetaan keragaman persepsi mahasiswa mengenai akuntabilitas pemerintah daerah dalam konteks isu pengadaan kendaraan dinas, bukan pada pengukuran perubahan kepercayaan dari waktu ke waktu.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memahami kepercayaan mahasiswa terhadap akuntabilitas Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam pengelolaan APBD. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian *public trust*, khususnya mengenai cara mahasiswa menilai akuntabilitas pemerintah daerah melalui dimensi *competence*, *benevolence*, dan *integrity*. Secara praktis, temuan penelitian diharapkan

dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan keterbukaan informasi, pertanggungjawaban anggaran, dan komunikasi publik.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam pandangan dan pemaknaan individu terhadap suatu fenomena dalam konteks tertentu (Creswell & Poth, 2018). Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami kepercayaan mahasiswa terhadap akuntabilitas Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Analisis dilakukan dengan menggunakan tiga dimensi *public trust*, yaitu *competence*, *benevolence*, dan *integrity*, untuk menelaah penilaian mahasiswa terhadap kemampuan pemerintah, kepedulian terhadap kepentingan masyarakat, serta integritas dalam pengelolaan anggaran publik (Grimmelikhuijsen & Knies, 2017).

Penelitian dilaksanakan di Kota Samarinda dengan melibatkan 15 mahasiswa aktif dari Universitas Mulawarman (Unmul), Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT), dan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda (Untag). Jumlah informan ditetapkan dengan mempertimbangkan kesesuaian informan dengan fokus penelitian dan kecukupan informasi yang diperoleh selama proses pengumpulan data. Kecukupan data dipertimbangkan berdasarkan pengulangan informasi yang muncul selama wawancara serta terbatasnya temuan atau tema baru pada wawancara terakhir (Hennink & Kaiser, 2022).

Pengumpulan data dilakukan pada akhir Juli hingga Agustus 2026 melalui wawancara semi-terstruktur dengan durasi sekitar 15–20 menit untuk setiap informan. Sebelum wawancara dimulai, peneliti meminta persetujuan informan untuk melakukan wawancara dan mendokumentasikan jawaban mereka. Dokumentasi dilakukan melalui rekaman suara pada wawancara yang memperoleh izin untuk direkam, sedangkan wawancara yang tidak direkam didokumentasikan melalui catatan tertulis selama proses wawancara berlangsung. Rekaman yang tersedia kemudian ditranskripsikan untuk keperluan analisis, sementara jawaban yang tidak direkam dianalisis berdasarkan catatan wawancara. Identitas informan disamarkan menggunakan kode untuk menjaga kerahasiaan mereka.

Dokumentasi wawancara dilakukan dengan menyesuaikan persetujuan informan. Wawancara yang memperoleh persetujuan untuk direkam didokumentasikan dalam bentuk rekaman audio dan ditranskripsikan untuk keperluan analisis. Apabila informan tidak bersedia direkam, peneliti mencatat jawaban informan selama wawancara berlangsung. Dengan demikian, data primer penelitian terdiri atas transkrip wawancara dan catatan hasil wawancara. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi dan studi pustaka yang relevan, meliputi artikel ilmiah, dokumen pemerintah, laporan, serta pemberitaan mengenai pengadaan kendaraan dinas dan pengelolaan APBD Provinsi Kalimantan Timur.

Analisis data mengacu pada model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Pada tahap kondensasi data, hasil wawancara ditelaah dan dipilih berdasarkan keterkaitannya dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data dikelompokkan dan disajikan berdasarkan tema-tema yang muncul dari jawaban informan, terutama yang berkaitan dengan kompetensi, kepedulian, integritas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan APBD. Kesimpulan kemudian ditarik berdasarkan pola dan keterkaitan antartemuan serta diverifikasi dengan meninjau kembali data wawancara dan dokumen pendukung.

Pengelompokan persepsi kepercayaan mahasiswa dilakukan melalui perpaduan pendekatan deduktif dan induktif. Pendekatan deduktif digunakan dengan menjadikan konsep *public trust* sebagai landasan awal untuk memahami penilaian informan. Sementara itu, pendekatan induktif digunakan dengan memperhatikan pola jawaban yang berulang dan

perbedaan pandangan yang muncul selama analisis. Berdasarkan proses tersebut, persepsi informan dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu *Critical Trust*, *Conditional Trust*, dan *Distrust*. *Critical Trust* menggambarkan kepercayaan yang disertai sikap kritis terhadap pemerintah, *Conditional Trust* menggambarkan kepercayaan yang bergantung pada kondisi atau bukti tertentu, sedangkan *Distrust* menggambarkan ketidakpercayaan informan terhadap pemerintah dalam konteks yang diteliti. Ketiga kategori tersebut merupakan hasil pengelompokan analitis berdasarkan kerangka teori dan pola jawaban informan, bukan kategori baku yang secara langsung ditetapkan oleh Grimmelikhuijsen dan Knies (2017).

Kecukupan data dipertimbangkan melalui perbandingan jawaban antar-informan selama proses pengumpulan dan analisis data. Peneliti memperhatikan pengulangan informasi serta ada atau tidaknya tema substantif baru yang relevan dengan fokus penelitian. Pertimbangan ini sejalan dengan pembahasan Hennink dan Kaiser (2022) mengenai saturasi dalam penelitian kualitatif, yang menekankan bahwa kecukupan data perlu dilihat berdasarkan tujuan penelitian, karakteristik informan, dan perkembangan tema selama pengumpulan data.

Untuk menjaga kredibilitas interpretasi, analisis dilakukan dengan mengacu pada data wawancara yang tersedia, membandingkan persamaan dan perbedaan pandangan antar-informan, serta menelaah kesesuaiannya dengan fokus dan kerangka konseptual penelitian. Data berupa transkrip dan catatan wawancara digunakan sesuai bentuk dokumentasi yang tersedia. Hasil analisis kemudian dipertimbangkan bersama sumber data sekunder yang relevan untuk memberikan konteks terhadap isu yang diteliti. Dalam penyajian hasil, identitas informan disamarkan menggunakan kode informan untuk menjaga kerahasiaan identitasnya.

Penelitian ini berfokus pada persepsi 15 informan yang diwawancarai di Samarinda pada akhir Juli hingga Agustus 2026. Informan dipilih secara purposif berdasarkan kriteria yang relevan dengan fokus penelitian. Oleh karena itu, temuan penelitian tidak dimaksudkan untuk mewakili seluruh mahasiswa atau masyarakat Kalimantan Timur. Penelitian ini juga terbatas pada konteks peristiwa yang spesifik dan menggunakan desain *cross-sectional*, sehingga hanya menggambarkan persepsi informan pada periode pengumpulan data dan tidak mengukur perubahan tingkat kepercayaan dari waktu ke waktu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pola Kepercayaan Mahasiswa terhadap Pemerintah Daerah

Hasil wawancara terhadap 15 mahasiswa dari tiga perguruan tinggi di Samarinda menunjukkan adanya keragaman persepsi mengenai akuntabilitas Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam pengelolaan APBD, khususnya dalam konteks isu pengadaan kendaraan dinas. Berdasarkan analisis terhadap jawaban informan, ditemukan tiga pola persepsi kepercayaan, yaitu *Critical Trust*, *Conditional Trust*, dan *Distrust*. *Critical Trust* menggambarkan kepercayaan yang disertai sikap kritis terhadap pengelolaan anggaran dan tuntutan akan keterbukaan pemerintah. *Conditional Trust* menggambarkan kepercayaan yang bergantung pada pemenuhan kondisi tertentu, seperti transparansi, ketepatan prioritas anggaran, dan pertanggungjawaban pemerintah. Sementara itu, *Distrust* menggambarkan persepsi ketidakpercayaan informan terhadap pemerintah dalam konteks yang diteliti. Ketiga pola tersebut merupakan hasil pengelompokan analitis berdasarkan jawaban informan, bukan kategori yang secara langsung ditetapkan oleh teori *public trust*.

Tabel 1. Tipologi Kepercayaan Mahasiswa terhadap Pemerintah Daerah

No.	Kode Informan	Perguruan Tinggi	Kategori Kepercayaan	Dasar Klasifikasi
1	Unmul-01	Universitas Mulawarman	Critical Trust	Masih memberikan kepercayaan, tetapi menjadi lebih kritis terhadap pengelolaan APBD dan menuntut keterbukaan serta pertanggungjawaban pemerintah.

2	Unmul-02	Universitas Mulawarman	Conditional Trust	Kepercayaan masih ada, tetapi bersyarat pada keterbukaan pemerintah, ketepatan penggunaan anggaran, dan bukti pertanggungjawaban.
3	Unmul-03	Universitas Mulawarman	Conditional Trust	Sangat kritis terhadap efektivitas, prioritas, dan transparansi APBD, tetapi tidak menunjukkan kehilangan kepercayaan secara total.
4	Unmul-04	Universitas Mulawarman	Conditional Trust	Masih melihat adanya kemampuan pemerintah, namun kepercayaan bergantung pada perbaikan kinerja, prioritas anggaran, dan transparansi.
5	Unmul-05	Universitas Mulawarman	Conditional Trust	Kepercayaan berada pada tingkat sedang; informan masih percaya pemerintah bekerja, tetapi tidak memberikan kepercayaan tanpa melihat proses dan hasil pengelolaan anggaran.
6	UMKT-01	Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur	Critical Trust	Masih percaya kepada pemerintah, tetapi lebih kritis setelah pemberitaan kendaraan dinas dan mengharapkan penjelasan yang lebih terbuka.
7	UMKT-02	Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur	Critical Trust	Kepercayaan masih ada, tetapi informan menilai pemerintah perlu membuktikan efektivitas, ketepatan sasaran, dan pertanggungjawaban penggunaan APBD.
8	UMKT-03	Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur	Critical Trust	Memiliki tingkat kepercayaan yang cukup, tetapi tetap kritis terhadap kebijakan anggaran dan meminta transparansi serta komunikasi publik yang lebih baik.
9	UMKT-04	Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur	Critical Trust	Masih memiliki kepercayaan yang cukup baik; penurunan kepercayaan dapat dipulihkan karena respons pemerintah terhadap kritik dipandang sebagai upaya positif.
10	UMKT-05	Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur	Conditional Trust	Kepercayaan berada pada tingkat sedang cenderung skeptis; informan masih mengakui pemerintah bekerja, tetapi meragukan efisiensi dan komitmen pengelolaan anggaran.
11	Untag-01	Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda	Distrust	Menunjukkan ketidakpercayaan yang kuat terhadap pemerintah dalam pengelolaan APBD dan menilai transparansi serta pertanggungjawaban masih sangat lemah.
12	Untag-02	Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda	Conditional Trust	Kepercayaan berada sekitar 60%; informan masih membuka kemungkinan percaya kembali apabila pemerintah memberikan bukti nyata dan transparansi.
13	Untag-03	Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda	Critical Trust	Menilai pemerintah cukup baik, tetapi tetap kritis terhadap ketepatan sasaran dan mengharapkan perbaikan transparansi serta manfaat anggaran bagi masyarakat.
14	Untag-04	Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda	Conditional Trust	Kepercayaan berada pada tingkat sedang; informan masih mengakui manfaat program pemerintah, tetapi menuntut transparansi dan prioritas anggaran yang lebih baik.
15	Untag-05	Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda	Conditional Trust	Kepercayaan masih ada tetapi lebih kritis; informan menilai pemerintah perlu meningkatkan transparansi, ketepatan prioritas, dan komunikasi publik.

Secara keseluruhan, ketiga pola tersebut menunjukkan bahwa persepsi kepercayaan mahasiswa terhadap pemerintah daerah tidak bersifat seragam. Perbedaan persepsi terlihat dari tingkat kepercayaan yang masih disertai sikap kritis, kepercayaan yang bergantung pada kondisi tertentu, hingga ketidakpercayaan terhadap pemerintah dalam konteks pengelolaan APBD yang diteliti. Keragaman tersebut terutama tercermin dalam penilaian informan terhadap kemampuan pemerintah menentukan prioritas anggaran (*competence*), perhatian terhadap kebutuhan masyarakat (*benevolence*), serta keterbukaan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (*integrity*), sebagaimana dijelaskan dalam kerangka *public trust* oleh Grimmelikhuijsen dan Knies (2017).

Temuan ini sejalan dengan Beshi dan Kaur (2020), yang membahas pentingnya tata kelola pemerintahan, termasuk transparansi dan akuntabilitas, dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Selain itu, Popova dan Grishin (2023) menyoroti keterkaitan kepercayaan politik generasi muda dengan komunikasi dan sumber informasi politik yang diakses. Dalam penelitian ini, informasi mengenai isu pengadaan kendaraan dinas menjadi konteks bagi informan untuk menyampaikan penilaian mereka terhadap pengelolaan APBD. Namun, hasil penelitian lebih lanjut memperlihatkan bahwa informan tidak hanya menyoroti informasi yang diterima, tetapi juga mempertimbangkan prioritas anggaran, manfaat bagi masyarakat, serta pertanggungjawaban pemerintah. Dengan demikian, temuan ini menggambarkan keragaman cara mahasiswa menilai akuntabilitas pemerintah daerah melalui pengalaman dan informasi yang mereka miliki.

Akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan APBD

Hasil penelitian menunjukkan bahwa informan mengaitkan isu pengadaan kendaraan dinas dengan penilaian mereka terhadap akuntabilitas pemerintah daerah. Penilaian tersebut tidak hanya didasarkan pada ada atau tidaknya dasar administratif pengadaan, tetapi juga pada alasan pengadaan, besarnya anggaran, prioritas penggunaan APBD, dan manfaatnya bagi masyarakat. Dengan demikian, akuntabilitas dipahami mahasiswa sebagai kemampuan pemerintah untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan keputusan anggaran kepada publik. Unmul-05 menunjukkan perubahan penilaian tersebut dengan menyatakan bahwa “Peristiwa itu jujur menurunkan tingkat kepercayaan saya. Rasanya ada jarak antara prioritas pemerintah dan kebutuhan real masyarakat. Akuntabilitas itu bukan cuma soal laporan keuangan yang dapat opini ‘WTP’ dari BPK, tapi juga soal kepatutan dan keadilan alokasi anggaran bagi publik.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa bagi informan tersebut, akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan administratif, tetapi juga mencakup kepatutan dan kebermanfaatan penggunaan anggaran bagi masyarakat.

Temuan tersebut berkaitan dengan dimensi *competence* dan *integrity* dalam konsep *public trust* Grimmelikhuijsen dan Knies (2017). *Competence* tercermin dari kemampuan pemerintah menentukan prioritas dan mengelola APBD secara efektif, sedangkan *integrity* berkaitan dengan keterbukaan dan kemampuan pemerintah mempertanggungjawabkan keputusan anggaran. Dalam konteks ini, mahasiswa mempertanyakan bukan hanya apakah pengadaan dapat dilakukan secara administratif, tetapi juga mengapa kebijakan tersebut dipilih dan sejauh mana manfaatnya bagi masyarakat.

Temuan penelitian ini sejalan dengan Nurrizkiana et al. (2017) yang menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berkaitan dengan kepercayaan *public stakeholders*. Hasibuan dan Listiarini (2025) juga menunjukkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam membangun kepercayaan masyarakat. Namun, penelitian ini memberikan penekanan berbeda dengan menunjukkan bahwa mahasiswa menggunakan peristiwa pengadaan anggaran tertentu sebagai dasar untuk mengevaluasi akuntabilitas secara lebih substantif, terutama melalui pertanyaan mengenai prioritas, kepatutan, dan manfaat anggaran. Dengan demikian, kontribusi temuan ini adalah memperlihatkan bahwa persepsi

akuntabilitas mahasiswa tidak hanya dibentuk oleh kepatuhan pemerintah terhadap prosedur, tetapi juga oleh kesesuaian keputusan anggaran dengan kepentingan publik.

Temuan ini juga relevan dengan penelitian Yuliastina et al. (2025) yang membahas hubungan akuntabilitas dan transparansi dengan kinerja pemerintah daerah. Dalam penelitian ini, jawaban informan menunjukkan bahwa penilaian mahasiswa terhadap akuntabilitas berkaitan dengan pandangan mereka mengenai kepercayaan kepada pemerintah. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa mahasiswa tidak hanya mempertimbangkan pemenuhan prosedur administratif, tetapi juga menilai prioritas, kepatutan, dan manfaat penggunaan anggaran bagi masyarakat. Namun, hasil ini menggambarkan persepsi informan dalam konteks penelitian dan tidak dimaksudkan untuk membuktikan hubungan sebab-akibat antara akuntabilitas dan kepercayaan publik.

Transparansi dan Prioritas Pengelolaan APBD

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dan ketepatan prioritas penggunaan APBD menjadi pertimbangan penting mahasiswa dalam menilai akuntabilitas pemerintah daerah. Mahasiswa tidak hanya membutuhkan informasi mengenai jumlah dan penggunaan anggaran, tetapi juga penjelasan mengenai alasan, tujuan, serta dasar pengambilan keputusan anggaran. Dengan demikian, keterbukaan informasi dipandang penting agar masyarakat dapat memahami dan mengawasi penggunaan anggaran publik. Unmul-03 menilai bahwa pemerintah secara administratif telah terbuka melalui portal resmi, tetapi informasi yang disampaikan masih terlalu teknis bagi masyarakat. Informan menyatakan, “Secara administratif sudah terbuka via portal resmi, tetapi belum komunikatif dan informasinya masih terlalu teknis bagi masyarakat awam.” Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa transparansi tidak cukup hanya dengan menyediakan informasi, tetapi juga perlu memastikan informasi dapat dipahami oleh masyarakat. Dalam konteks prioritas APBD, mahasiswa juga mempertanyakan apakah penggunaan anggaran telah diarahkan pada kebutuhan yang memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.

Temuan ini berkaitan dengan dimensi *benevolence* dan *integrity* dalam *public trust*. *Benevolence* tercermin dari penilaian mahasiswa terhadap keberpihakan pemerintah dalam menentukan prioritas anggaran, sedangkan *integrity* terlihat dari keterbukaan dan kejelasan pemerintah dalam menjelaskan penggunaan APBD. Temuan ini sejalan dengan Nurrizkiana et al. (2017) yang menunjukkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam membangun kepercayaan public stakeholders, serta Rasidayu et al. (2026) yang menempatkan transparansi anggaran sebagai bagian penting dalam peningkatan akuntabilitas publik. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa bagi mahasiswa, transparansi tidak hanya dipahami sebagai ketersediaan informasi, melainkan juga keterpahaman informasi dan kemampuan pemerintah menjelaskan alasan di balik keputusan anggaran. Temuan ini menegaskan bahwa transparansi dan ketepatan prioritas APBD menjadi dasar penting bagi mahasiswa dalam menilai akuntabilitas sekaligus mempertahankan kepercayaan terhadap pemerintah daerah.

Selain transparansi, temuan ini juga berkaitan dengan dimensi responsivitas sebagaimana dikemukakan oleh Beshi dan Kaur (2020), yang menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah tidak hanya dibentuk oleh transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga oleh daya tanggap pemerintah terhadap kebutuhan dan aspirasi warga. Dalam penelitian ini, ketidakpuasan mahasiswa terhadap informasi yang disampaikan melalui portal resmi mencerminkan lemahnya responsivitas pemerintah dalam mengomunikasikan kebijakan anggaran secara memadai bagi masyarakat awam. Persamaan dengan Beshi dan Kaur (2020) terletak pada penegasan bahwa transparansi tanpa responsivitas belum cukup untuk membangun kepercayaan, sedangkan perbedaannya terletak pada konteks penelitian ini yang menempatkan responsivitas secara spesifik pada keterpahaman informasi anggaran, bukan pada daya tanggap pemerintah secara umum. Temuan ini menunjukkan bahwa

keterbukaan informasi anggaran perlu disertai komunikasi publik yang responsif dan mudah dipahami, karena aspek tersebut menjadi pertimbangan mahasiswa dalam menilai akuntabilitas dan kepercayaan terhadap pemerintah daerah.

Harapan Mahasiswa terhadap Akuntabilitas Pemerintah Daerah

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian informan masih bersedia memberikan kepercayaan kepada pemerintah dengan syarat adanya transparansi, perbaikan pengelolaan dan prioritas APBD, keterbukaan terhadap kritik, serta bukti kinerja dan tindakan yang dapat diamati masyarakat. UMKT-04 menyatakan, “Jika penggunaan anggaran dilakukan secara terbuka dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, maka kepercayaan saya meningkat. Sebaliknya, apabila muncul kebijakan yang kurang dipahami masyarakat, kepercayaan tersebut dapat berkurang.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa informan mengaitkan kepercayaan dengan keterbukaan informasi dan manfaat penggunaan anggaran bagi masyarakat.

Dalam perspektif public trust, kondisi tersebut berkaitan dengan competence, benevolence, dan integrity. Pemerintah perlu menunjukkan kemampuan mengelola APBD secara tepat (competence), memastikan kebijakan berorientasi pada kepentingan masyarakat (benevolence), serta terbuka dan mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran (integrity). Temuan ini sejalan dengan Popova dan Grishin (2023) yang menekankan pentingnya komunikasi dalam kepercayaan politik, serta Nurrizkiana et al. (2017) dan Hasibuan dan Listiarini (2025) yang membahas pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam kepercayaan publik. Berdasarkan jawaban informan, komunikasi publik perlu disertai bukti kinerja, transparansi, ketepatan prioritas anggaran, serta respons pemerintah terhadap kritik masyarakat. Dengan demikian, harapan informan terhadap pemulihan kepercayaan dipahami sebagai pandangan mengenai kondisi yang diperlukan untuk memberikan kepercayaan kepada pemerintah, bukan sebagai bukti bahwa pemulihan tersebut telah terjadi.

Devine dan Valgarðsson (2024) membahas stabilitas dan perubahan kepercayaan politik dengan memperhatikan perkembangan kepercayaan dari waktu ke waktu. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini menggunakan wawancara yang dilakukan dalam satu periode sehingga tidak dapat memastikan perubahan kepercayaan mahasiswa secara longitudinal. Dalam penelitian ini, pernyataan sebagian informan mengenai kesediaan memberikan kepercayaan dengan syarat tertentu dipahami sebagai harapan terhadap akuntabilitas pemerintah, bukan bukti bahwa kepercayaan telah pulih. Temuan ini menegaskan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan konsistensi tindakan pemerintah sebagaimana dibahas oleh Hasibuan dan Listiarini (2025) serta Nurrizkiana et al. (2017).

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menemukan keragaman persepsi mahasiswa terhadap akuntabilitas Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam pengelolaan APBD, khususnya dalam konteks isu pengadaan kendaraan dinas. Berdasarkan analisis wawancara, ditemukan tiga pola persepsi, yaitu *Critical Trust*, *Conditional Trust*, dan *Distrust*. Ketiga pola tersebut menggambarkan perbedaan cara informan menilai kemampuan pemerintah dalam mengelola anggaran, perhatian terhadap kepentingan masyarakat, serta keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam penggunaan anggaran publik.

Berdasarkan hasil wawancara, penilaian informan terhadap akuntabilitas pemerintah berkaitan dengan transparansi, ketepatan prioritas APBD, dan kemampuan pemerintah menyampaikan pertanggungjawaban yang dapat dipahami masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak hanya dipahami sebagai pemenuhan prosedur administratif, tetapi juga berkaitan dengan kejelasan dasar pengambilan keputusan anggaran dan manfaatnya bagi masyarakat. Penilaian tersebut mencerminkan persepsi informan dalam

konteks penelitian ini, bukan hasil pemeriksaan objektif terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah.

Sebagian informan menyampaikan bahwa mereka bersedia memberikan kepercayaan apabila pemerintah menunjukkan transparansi yang mudah dipahami, penentuan prioritas anggaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, keterbukaan terhadap kritik, serta konsistensi dalam pertanggungjawaban. Pernyataan tersebut menunjukkan kondisi yang menurut informan penting dalam menilai akuntabilitas pemerintah. Temuan ini merupakan gambaran persepsi informan pada saat wawancara dan tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa kepercayaan telah pulih atau berubah dari waktu ke waktu.

Saran

Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur disarankan meningkatkan transparansi pengelolaan APBD melalui penyampaian informasi yang lebih sederhana, terbuka, dan mudah dipahami masyarakat. Selain itu, penentuan prioritas anggaran perlu lebih memperhatikan kebutuhan dan manfaat yang dirasakan masyarakat serta disertai pertanggungjawaban yang konsisten. Pemerintah juga perlu menyediakan ruang partisipasi dan pengawasan publik agar mahasiswa dan masyarakat dapat memberikan masukan terhadap kebijakan pengelolaan anggaran. Upaya tersebut diharapkan dapat menjawab perhatian dan harapan mahasiswa terhadap akuntabilitas pemerintah daerah serta mendukung terbangunnya kepercayaan publik.

REFERENSI

- Ananditha, Y., Alfazry, R., Rhama, B., Santoso, Y. A., & Suprayitno, S. (2025). Persepsi mahasiswa terhadap trust issue publik mengenai isu DPR RI (Studi kasus: Jurusan Ilmu Administrasi Negara). *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, 12(2), 697–708.
- ANTARA. (2026a, March 1). Gubernur Kalimantan Timur kembalikan mobil dinas baru Rp8,49 miliar. *ANTARA News Kalimantan Timur*. <https://kaltim.antaranews.com/berita/257526/gubernur-kalimantan-timur-kembalikan-mobil-dinas-baru-rp849-miliar>
- ANTARA. (2026b, March 1). Gubernur Kaltim kembalikan mobil dinas baru Rp8,49 miliar. *ANTARA News*. <https://www.antaranews.com/berita/5445502/gubernur-kaltim-kembalikan-mobil-dinas-baru-rp849-miliar>
- Beshi, T. D., & Kaur, R. (2020). Public trust in local government: Explaining the role of good governance practices. *Public Organization Review*, 20, 337–350. <https://doi.org/10.1007/s11115-019-00444-6>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Devine, D., & Valgarðsson, V. O. (2024). Stability and change in political trust: Evidence and implications from six panel studies. *European Journal of Political Research*, 63(2), 478–497. <https://doi.org/10.1111/1475-6765.12606>
- Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur. (2026, March 2). Pemprov Kaltim kembalikan mobil dinas gubernur, uang segera disetor ke kas daerah. <https://diskominfo.kaltimprov.go.id/berita/pemprov-kaltim-kembalikan-mobil-dinas-gubernur-uang-segera-disetor-ke-kas-daerah>
- Grimmelikhuijsen, S., & Knies, E. (2017). Validating a scale for citizen trust in government organizations. *International Review of Administrative Sciences*, 83(3), 583–601. <https://doi.org/10.1177/0020852315585950>
- Hasibuan, M. A., & Listiarini. (2025). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas syariah terhadap kepercayaan masyarakat pada pengelolaan dana publik di pemerintah daerah. *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(2), 279–297.

- Hennink, M., & Kaiser, B. N. (2022). Sample sizes for saturation in qualitative research: A systematic review of empirical tests. *Social Science & Medicine*, 292, 114523. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2021.114523>
- Media Kaltim. (2026, March 2). Respons aspirasi publik, Rudy Mas'ud kembalikan mobil dinas Rp8,49 miliar, ini mekanisme dan konsekuensinya. <https://mediakaltim.com/respons-aspirasi-publik-rudy-masud-kembalikan-mobil-dinas-rp849-miliar-ini-mekanisme-dan-konsekuensinya/>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Nurritziana, B., Handayani, L., & Widiastuty, E. (2017). Determinan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan implikasinya terhadap kepercayaan public-stakeholders. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 18(1), 28–47. <https://doi.org/10.18196/jai.18159>
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. (2026, March 2). Sesuai aspirasi publik, Gubernur Kaltim kembalikan mobil dinas baru. <https://kaltimprov.go.id/detailberita/sesuai-aspirasi-publik-gubernur-kaltim-kembalikan-mobil-dinas-baru>
- Popova, O. V., & Grishin, N. V. (2023). Political trust of the Russian youth through the prism of communication strategies choice. *Galactica Media: Journal of Media Studies*, 5(3), 79–101. <https://doi.org/10.46539/gmd.v5i3.362>
- Radio Republik Indonesia. (2026, March 2). Respons kritik publik, Pemprov Kaltim kembalikan mobil dinas. RRI. <https://berita.rri.co.id/samarinda/regional/2230575/about.html>
- Rasidayu, R. D., Pilar, A. W., Meirinawati, & Lumban Gaol, I. D. (2026). Transparansi anggaran daerah sebagai strategi peningkatan akuntabilitas publik. *Jurnal Nasional Evaluasi Kebijakan dan Administrasi Publik*, 1(2), 51–58.
- Yuliastina, M., Maulida, D. A., Amelia, W. R., & Alfian. (2025). Penguatan kinerja pemerintah daerah melalui kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas, dan transparansi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer*, 8(1), 14–29.